

AMBIVALENSI PERAN GURU PAI DALAM PENDISIPLINAN SISWA DI TENGAH UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Hoiruddin Fathurohman, Anie Rohaeni, Nashruddin Syarief, Syarif Hidayat

IAI Persis Bandung

Email : khoerudinibnada@gmail.com, rohaenieanie@iaipibandung.ac.id, nashruddinsyarief@iaipibandung.ac.id,
abufauzanabdullah@gmail.com

Abstract

This study examines the role ambivalence of Islamic Education (PAI) teachers in disciplining students amid the implementation of Child Protection Law. PAI teachers face dilemmas between moral-religious responsibilities to shape student character and legal restrictions governing child protection. The research employed qualitative method with case study approach at SDN Cipagalo 3 Bojongsoang and SMPN 2 Dayeuhkolot, Bandung Regency. Data were collected through in-depth interviews with two PAI teachers, observation, and documentation study, then analyzed using descriptive-qualitative techniques. Results show that PAI teachers understand disciplinary responsibility as spiritual mandate implemented through religious habituation and exemplary modeling. Attitudes toward Child Protection Law are characterized by caution and adaptation, despite concerns about potential reporting. Applied strategies include mutual agreements with students, cross-role collaboration with school stakeholders, and parent involvement in consultation-based resolution. The study concludes that discipline can be effectively implemented within Islamic ta'dib framework when conducted through compassionate, communicative approaches supported by integrated institutional systems. These findings contribute to developing disciplinary strategies aligned with Islamic values and legal regulations..

Keywords: Role Ambivalence, Islamic Education Teacher, Student Discipline, Child Protection, Ta'dib

Abstrak

Penelitian ini mengkaji ambivalensi peran Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam mendisiplinkan siswa di tengah implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak. Guru PAI menghadapi dilema antara tanggung jawab moral-religius membentuk karakter siswa dengan pembatasan hukum yang mengatur perlindungan anak. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di SDN Cipagalo 3 Bojongsoang dan SMPN 2 Dayeuhkolot Kabupaten Bandung. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan dua guru PAI, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru PAI memahami tanggung jawab pendisiplinan sebagai amanah spiritual yang dijalankan melalui pembiasaan nilai keagamaan dan keteladanan. Sikap terhadap UU Perlindungan Anak ditandai kehati-hatian dan adaptasi, meskipun terdapat kekhawatiran terhadap potensi pelaporan. Strategi yang diterapkan meliputi kesepakatan bersama dengan siswa, kolaborasi lintas peran dengan pihak sekolah, serta pelibatan orang tua dalam penyelesaian berbasis musyawarah. Penelitian menyimpulkan bahwa pendisiplinan dapat dijalankan efektif dalam kerangka ta'dib Islami jika dilakukan dengan pendekatan kasih sayang, komunikatif, dan didukung sistem kelembagaan terintegrasi. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan strategi pendisiplinan yang selaras dengan nilai Islam dan regulasi hukum.

Kata kunci: Ambivalensi Peran, Guru PAI, Pendisiplinan Siswa, Perlindungan Anak, Ta'dib

PENDAHULUAN

Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran strategis dalam sistem pendidikan nasional, tidak hanya sebagai penyampai materi keagamaan tetapi juga sebagai pembina karakter dan kedisiplinan siswa. Dalam perspektif Islam, guru PAI mengemban tanggung jawab sebagai *murabbi* (pendidik), *mu'allim* (pengajar), dan *mu'addib* (pembina adab) yang bertugas membentuk generasi beriman, berakhlak mulia, dan disiplin sesuai ajaran Islam (Naquib, 2021). Idealnya, guru PAI dapat menjalankan fungsi pembinaan kedisiplinan melalui pendekatan *ta'dib* yang menekankan kasih sayang, keteladanan, dan ketegasan dalam koridor nilai-nilai keislaman.

Realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara idealisme peran tersebut dengan praktik pendidikan kontemporer. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perlindungan Anak, guru PAI menghadapi dilema kompleks antara menjalankan tanggung jawab moral-religius dengan pembatasan hukum yang ketat. Berbagai kasus mengemuka, seperti pelaporan guru PAI Akbar Sarosa pada tahun 2023 karena mendisiplinkan siswa yang tidak melaksanakan shalat, serta kasus serupa di Konawe yang berujung penahanan guru (Puspapertiwi & Nugroho, 2024; Suzatri, 2023). Fenomena ini menciptakan iklim ketakutan di kalangan pendidik yang berimplikasi pada menurunnya kualitas pembinaan karakter di sekolah.

Penelitian terkini mengkonfirmasi adanya ambivalensi peran guru dalam konteks perlindungan anak. (Mursalina et al., 2025) mengidentifikasi konflik mendasar antara penerapan UU Perlindungan Anak dengan penegakan kedisiplinan sekolah, di mana guru mengalami tekanan psikologis dan cenderung menghindari tindakan disipliner karena khawatir dianggap melanggar hukum. Temuan serupa dikemukakan (Pratiwi & Syukur, 2019; Pulungan, 2024) yang menunjukkan dampak signifikan pemberlakuan undang-undang tersebut terhadap penurunan otoritas guru dan meningkatnya perilaku menyimpang siswa di SMK Negeri 2 Makassar.

Dari perspektif hukum, Mawardy dan Adityo (2024) mengevaluasi efektivitas UU No. 35 Tahun 2014 di tingkat sekolah dasar, menemukan bahwa implementasi regulasi berjalan baik secara struktural namun masih menghadapi hambatan dalam aspek budaya hukum dan partisipasi masyarakat. Sementara itu, (Munawir, 2019) menyoroti pergeseran paradigma masyarakat terhadap otoritas guru, di mana tindakan edukatif semakin rentan diinterpretasikan sebagai pelanggaran hukum. Studi khusus tentang guru PAI dilakukan (Nasution, 2021; Roza et al., 2019) yang mengkaji persepsi guru PAI SMK Negeri 3 Yogyakarta terhadap UU Perlindungan Anak, mengungkap keragaman persepsi guru dan perubahan pendekatan pembelajaran yang lebih humanis, namun belum secara mendalam mengeksplorasi strategi coping dan ambivalensi peran yang dialami guru PAI dalam praktik pendisiplinan.

Kesenjangan penelitian tersebut menunjukkan perlunya kajian mendalam tentang dinamika peran guru PAI dalam konteks regulasi perlindungan anak. Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam beberapa aspek. Pertama, fokus spesifik pada guru PAI sebagai subjek yang memiliki dimensi tanggung jawab moral-religius unik dibandingkan guru mata pelajaran lain. Kedua, penggunaan konsep ambivalensi peran untuk menganalisis ketegangan antara nilai-nilai keislaman dan regulasi hukum positif. Ketiga, eksplorasi strategi *ta'dib* sebagai pendekatan alternatif dalam pendisiplinan yang sejalan dengan nilai Islam dan regulasi perlindungan anak. Keempat, kontribusi empiris dari konteks lokal Kabupaten Bandung yang dapat memperkaya pemahaman tentang dinamika pendidikan Islam di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk tanggung jawab guru PAI dalam membina kedisiplinan siswa, memahami persepsi mereka terhadap UU Perlindungan Anak, serta mengidentifikasi strategi yang dikembangkan untuk menegakkan disiplin tanpa melanggar regulasi hukum yang berlaku. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan pendidikan karakter Islami yang adaptif terhadap dinamika hukum dan sosial kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi ambivalensi peran guru PAI dalam pendisiplinan siswa. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pemahaman mendalam tentang pengalaman subjektif dan strategi adaptif yang dikembangkan guru dalam menghadapi ketegangan antara tanggung jawab moral-religius dan pembatasan hukum.

Lokasi penelitian adalah SDN Cipagalo 3 Kecamatan Bojongsoang dan SMPN 2 Dayeuhkolot Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Kedua sekolah dipilih untuk merepresentasikan jenjang pendidikan dasar dan menengah serta menunjukkan karakteristik sosial yang relevan dengan fokus penelitian. Informan utama adalah dua guru PAI yang dipilih secara purposive berdasarkan kriteria keterlibatan aktif dalam pembinaan kedisiplinan siswa dan pengalaman menghadapi dinamika regulasi perlindungan anak.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Wawancara mendalam semi-terstruktur digunakan untuk menggali pengalaman, pandangan, dan strategi guru PAI. Observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati interaksi guru-siswa dalam konteks penerapan disiplin. Studi dokumentasi mencakup tata tertib sekolah, kebijakan disiplin internal, dan dokumen regulasi terkait. Data dikumpulkan selama periode Mei-Juni 2025 dengan mempertimbangkan kesiapan informan dan kalender akademik sekolah.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif (Miles et al., 2020) yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses koding dilakukan terhadap transkrip wawancara untuk mengidentifikasi kategori tematik dan pola-pola temuan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode, serta member checking dengan mengonfirmasi hasil interpretasi kepada informan. Proses analisis bersifat siklikal dan dilakukan secara terus-menerus sejak awal pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil dapat disajikan dalam bentuk tabel angka-angka, grafik, deskripsi verbal, atau gabungan antara ketiganya. Tabel, grafik, atau gambar tidak boleh terlalu panjang, terlalu besar, atau terlalu banyak. Penulis sebaiknya menggunakan variasi penyajian tabel, grafik, atau deskripsi verbal. Tabel dan grafik yang disajikan harus dirujuk dalam teks. Cara penulisan tabel ditunjukkan pada Tabel 1. Tabel tidak memuat garis vertikal (tegak) dan garis horisontal (datar) hanya ada di kepala dan ekor tabel. Ukuran huruf isian tabel dan gambar boleh diperkecil.

Penelitian dilaksanakan di dua lokasi berbeda untuk merepresentasikan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Di SDN Cipagalo 3 Bojongsoang, informan adalah guru PAI laki-laki berusia 45 tahun dengan pengalaman mengajar 3 tahun. Di SMPN 2 Dayeuhkolot, informan adalah guru PAI laki-laki berusia 42 tahun dengan pengalaman mengajar 2 tahun. Kedua informan memiliki latar belakang pendidikan S2 dan aktif terlibat dalam pembinaan kedisiplinan siswa melalui program keagamaan sekolah.

Tanggung Jawab Guru PAI dalam Membina Kedisiplinan Siswa

Kedua guru PAI memahami tanggung jawab mereka secara holistik, melampaui fungsi pengajaran konvensional. Guru PAI di SMPN 2 Dayeuhkolot menyatakan bahwa tanggung jawabnya "bukan hanya di dunia tapi di akhirat juga" karena menyangkut aspek moral dan spiritual siswa. Pemahaman ini mendorong guru untuk mengintegrasikan pembinaan ibadah dalam proses pendisiplinan, khususnya melalui program ceklis shalat harian dan kesepakatan awal dengan siswa.

Guru PAI di SDN Cipagalo 3 mengimplementasikan tanggung jawabnya melalui program pembiasaan yang terstruktur. Program Asmaul Husna setiap Selasa pagi bertujuan menanamkan disiplin waktu dan adab terhadap guru. Tausyiah Jumat melibatkan siswa sebagai MC, pembaca Al-Qur'an, dan penampil qasidah untuk menumbuhkan tanggung jawab dan kepercayaan diri. Kegiatan Pesantren Ramadan menjadi momentum pembentukan karakter peduli dan implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan pendekatan antara jenjang SD dan SMP dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Perbandingan Pendekatan Pendisiplinan Guru PAI

Aspek	SDN Cipagalo 3	SMPN 2 Dayeuhkolot
Fokus Utama	Pembentukan karakter dasar dan nilai sosial	Kedisiplinan ibadah wajib (shalat)
Metode	Pembiasaan kolektif melalui kegiatan keagamaan	Kesepakatan individual dengan sistem kontrol
Bentuk Kegiatan	Asmaul Husna, Tausyiah Jumat, Pesantren Ramadan	Ceklis shalat harian, pembinaan bertahap
Pendekatan	Humanis dan kolaboratif	Struktural berbasis konsekuensi
Pelibatan Siswa	Aktif sebagai pelaksana kegiatan	Partisipasi dalam kesepakatan aturan

Pemahaman dan Sikap Terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak

Guru PAI SMPN 2 Dayeuhkolot menunjukkan pemahaman yang memadai terhadap substansi UU No. 35 Tahun 2014. Ia menyatakan bahwa tindakan yang diterapkan "masih di atas kewajaran, artinya tidak sampai melanggar hak anak." Guru ini memahami bahwa membina siswa dalam hal ibadah justru merupakan pemenuhan hak spiritual siswa sebagai muslim, bukan pelanggaran hak anak.

Sebaliknya, guru PAI SDN Cipagalo 3 mengakui keterbatasan pemahamannya terhadap undang-undang tersebut. Setelah membaca dokumen hukum, ia memahami perlindungan khusus untuk anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 59 tentang anak korban kekerasan, eksploitasi, dan berbagai bentuk kejahatan lainnya.

Kedua guru mengalami dilema dan kekhawatiran dalam menerapkan pendisiplinan. Guru SMP mengungkapkan bahwa "dilema dan ragu pasti ada" karena pergeseran paradigma dari masa lalu ketika guru dan orang tua tidak segan menghukum siswa. Kini mereka tidak mengambil "tindakan yang berlebihan" karena terbentur undang-undang.

Pengalaman Konflik dan Penyelesaiannya

Guru PAI SMPN 2 Dayeuhkolot pernah mengalami kasus ketika tindakan mendisiplinkan siswa dilaporkan kepada orang tua. Namun, masalah diselesaikan melalui musyawarah ketika orang tua datang ke sekolah untuk klarifikasi. Orang tua akhirnya memahami bahwa tindakan guru bersifat edukatif, bukan kekerasan.

Guru PAI SDN Cipagalo 3 mengalami pengalaman serupa ketika mengeluarkan siswa dari kelas karena perilaku mengganggu. Tindakan ini mendapat teguran dari kepala sekolah dan memicu kedatangan orang tua untuk meminta penjelasan. Meskipun orang tua akhirnya memahami maksud edukatif tindakan tersebut, pengalaman ini memberikan pelajaran tentang pentingnya kehati-hatian dalam penerapan disiplin.

Strategi Pendisiplinan Tanpa Melanggar Regulasi

Guru PAI mengembangkan strategi adaptif untuk tetap menjalankan fungsi pembinaan tanpa melanggar hukum. Strategi utama yang diterapkan dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2. Kategori Strategi Pendisiplinan Guru PAI

Kategori Strategi	Bentuk Implementasi	Tujuan
Preventif	Sosialisasi UU Perlindungan Anak kepada siswa	Membangun pemahaman timbal balik
Partisipatif	Kesepakatan awal guru-siswa	Menciptakan komitmen bersama
Kolaboratif	Melibatkan wali kelas, BK, kepala sekolah	Dukungan sistem kelembagaan
Komunikatif	Home visit dan dialog dengan orang tua	Penyelesaian berbasis musyawarah
Edukatif	Penjelasan makna tindakan kepada siswa	Internalisasi nilai tanpa paksaan

Pembahasan

Temuan penelitian mengkonfirmasi adanya ambivalensi peran yang dialami guru PAI dalam melaksanakan fungsi pendisiplinan. Ambivalensi ini muncul sebagai hasil dari benturan antara peran normatif sebagai pembina moral-spiritual dan peran faktual yang dibatasi oleh regulasi hukum. Dalam teori peran (Soekanto, 2012), kondisi ini menggambarkan ketidaksesuaian antara harapan sosial terhadap guru dan realitas struktural yang membatasi ruang gerak profesional mereka.

Konsep *ta'dib* yang diterapkan guru PAI sejalan dengan pemikiran (Naquib, 2021) tentang pendidikan Islam yang menekankan pembentukan adab melalui ilmu, keteladanan, dan kasih sayang. Program pembiasaan keagamaan yang dikembangkan di kedua sekolah mencerminkan implementasi *ta'dib* dalam konteks pendidikan formal. Pembiasaan Asmaul Husna, tausyiah, dan ceklis ibadah bukan sekadar aktivitas ritual, tetapi strategi sistematis untuk menginternalisasi nilai-nilai kedisiplinan dalam diri siswa.

Strategi pendisiplinan yang dikembangkan guru PAI menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap tekanan regulatif tanpa mengabaikan esensi pendidikan Islam. Pendekatan kesepakatan bersama dengan siswa mencerminkan prinsip musyawarah dalam Islam yang menekankan partisipasi dan tanggung jawab kolektif. Hal ini sejalan dengan model manajemen konflik kolaboratif yang dikemukakan (Anwar, 2018), di mana solusi dicari melalui keterlibatan aktif semua pihak.

Perbedaan pendekatan antara jenjang SD dan SMP mengindikasikan adanya adaptasi developmentally appropriate practice dalam pendisiplinan Islami. Di tingkat SD, fokus pada pembentukan karakter dasar melalui pembiasaan positif sesuai dengan tahap perkembangan moral anak yang masih memerlukan struktur eksternal. Di tingkat SMP, pendekatan berbasis kesepakatan dan konsekuensi mencerminkan pengakuan terhadap perkembangan kognitif remaja yang mulai mampu memahami hubungan sebab-akibat secara lebih kompleks (Sokip et al., 2025; Wuryandani et al., 2014).

Fenomena kekhawatiran dan dilema yang dialami guru mencerminkan tekanan psikologis yang muncul dari ambivalensi peran. (Jaspers, 2022) menjelaskan bahwa ambivalensi kronis dalam profesi pendidikan dapat memicu kelelahan emosional dan penurunan motivasi kerja. Dalam konteks guru PAI, tekanan ini diperberat oleh dimensi spiritual tanggung jawab yang tidak hanya bersifat profesional tetapi juga moral-religius.

Strategi penyelesaian konflik melalui musyawarah dan pelibatan orang tua menunjukkan penerapan prinsip restorative justice dalam konteks pendidikan Islam. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan masalah secara teknis tetapi juga membangun pemahaman bersama tentang tujuan pendidikan dan pentingnya kolaborasi dalam pembentukan karakter siswa. Temuan ini mengkonfirmasi hasil penelitian (Mursalina et al.,

2025) yang menekankan perlunya pendekatan kolaboratif dalam menyelesaikan konflik antara perlindungan anak dan penegakan disiplin sekolah.

Perbedaan tingkat pemahaman guru terhadap UU Perlindungan Anak sejalan dengan temuan (Nasution, 2021; Rahman, 2024) yang mengidentifikasi keragaman persepsi guru PAI terhadap regulasi tersebut. Ketidapahaman yang memadai dapat memicu interpretasi berlebihan yang justru menghambat proses pendidikan. Sebaliknya, pemahaman yang tepat memungkinkan guru untuk tetap menjalankan fungsi edukatif dalam koridor hukum yang berlaku.

Kontribusi teoritis penelitian ini terletak pada pengembangan konsep ambivalensi peran dalam konteks pendidikan Islam. Ambivalensi yang dialami guru PAI bukan sekadar konflik profesional biasa, tetapi ketegangan antara sistem nilai yang berbeda – nilai religius dan nilai hukum positif. Resolusi ambivalensi ini memerlukan pendekatan integratif yang menyelaraskan kedua sistem nilai melalui strategi praktis yang dapat diimplementasikan dalam konteks sekolah.

Temuan penelitian ini juga memperkuat hasil studi (Pratiwi & Syukur, 2019) tentang dampak UU Perlindungan Anak terhadap praktik pendisiplinan, namun memberikan perspektif baru melalui fokus pada guru PAI yang memiliki dimensi tanggung jawab moral-religius unik. Strategi adaptif yang dikembangkan guru PAI menunjukkan bahwa pendisiplinan Islami tetap dapat dijalankan secara efektif dalam kerangka regulasi perlindungan anak melalui pendekatan yang tepat.

Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa kunci keberhasilan terletak pada kemampuan guru untuk mengembangkan strategi adaptif yang menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan tuntutan hukum, didukung oleh sistem kelembagaan yang terintegrasi dan komunikasi yang harmonis dengan orang tua siswa. Model pendisiplinan yang dikembangkan dapat menjadi referensi bagi sekolah lain dalam mengimplementasikan pendidikan karakter Islami yang responsif terhadap dinamika hukum dan sosial kontemporer.

PENUTUP

Penelitian ini mengungkap ambivalensi peran yang dialami guru Pendidikan Agama Islam dalam mendisiplinkan siswa di tengah implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak. Guru PAI memahami tanggung jawab pendisiplinan sebagai amanah spiritual melalui pendekatan *ta'dib* Islami, dengan perbedaan implementasi antara jenjang SD yang menekankan pembiasaan karakter dan SMP yang menggunakan pendekatan berbasis kesepakatan.

Sikap guru terhadap regulasi perlindungan anak menunjukkan keragaman pemahaman namun kesamaan dilema psikologis dalam menyeimbangkan idealisme pendidikan dan pembatasan hukum. Untuk mengatasi ambivalensi ini, guru mengembangkan strategi adaptif meliputi pendekatan preventif, partisipatif, kolaboratif, komunikatif, dan edukatif yang menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan tuntutan regulasi.

Kontribusi teoritis penelitian terletak pada pengembangan konsep ambivalensi peran dalam konteks pendidikan Islam yang melibatkan dimensi spiritual unik. Secara praktis, penelitian menunjukkan bahwa pendisiplinan Islami tetap dapat dijalankan efektif dalam kerangka regulasi perlindungan anak melalui dukungan sistem kelembagaan terintegrasi. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi penerapan model ini pada konteks madrasah dan pesantren, serta kajian longitudinal efektivitas jangka panjang terhadap pembentukan karakter siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, K. (2018). Urgensi penerapan manajemen konflik dalam organisasi pendidikan. *Al-Fikri: Jurnal Studi Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 1(2), 31–38.
- Jaspers, J. (2022). Linguistic dilemmas and chronic ambivalence in the classroom. *Journal of Multilingual and Multicultural Development*, 43(4), 281–294. <https://doi.org/10.1080/01434632.2020.1733586>
- Mawardy, I., & Adityo, R. D. (2024). Efektivitas Undang-Undang Ri No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasca Peristiwa Tindak Kekerasan Anak Di Sekolah Dasar. *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, 2(2), 256–270.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4 ed.). SAGE Publications.
- Munawir, A. (2019). paradigma guru dan orangtua terhadap penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Di Sekolah. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 4(2), 110–123.
- Mursalina, S. A., Zulfah, Z., & Nurkolis, N. (2025). Konflik Antara Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Dengan Penegakan Kedisiplinan Sekolah. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 8(3), 176–185.
- Naquib, A. A. S. (2021). Islam dan Sekularisme. In *PUSAT PENGAJIAN TINGGI ISLAM, SAINS DAN*

PERADABAN RAJA ZARITH SOFIAH (3 ed.). PUSAT PENGAJIAN TINGGI ISLAM, SAINS DAN PERADABAN RAJA ZARITH SOFIAH.

- Nasution, N. F. H. (2021). *Persepsi Guru Pai Smk Negeri 3 Yogyakarta Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
- Pratiwi, R., & Syukur, M. (2019). Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Pendisiplinan Siswa di SMK Negeri 2 Makassar. *Jurnal Sosialisasi*, 6(3), 117–122.
- Pulungan, M. (2024). Pengaruh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Guru Dalam Mendidik Siswa. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 3(10), 2211–2220.
- Puspapertiwi, E. R., & Nugroho, R. S. (2024). Guru Honorer di Konawe Ditahan, Dituduh Pukuli Anak Polisi, Dimintai Rp 50 Juta agar Damai. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/10/22/141000365/guru-honorer-di-konawe-ditahan-dituduh-pukuli-anak-polisi-dimintai-rp-50>
- Rahman, M. A. (2024). *Peran Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Membentuk Kedisiplinan Siswa Siswi Kelas VII SMPN 1 Raman Utara*. IAIN Metro.
- Roza, D., Nurhafizah, N., & Yaswinda, Y. (2019). Urgensi profesionalisme guru pendidikan anak usia dini dalam penyelenggaraan perlindungan anak. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1), 277.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi: suatu pengantar*. Raja Grafindo Persada.
- Sokip, S., Asrop, S., Habibulloh, M., Sahri, S., & Munif, M. (2025). Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Siswa di SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT Jombang. *Althanshia: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 41–56.
- Suzatri, A. (2023). Kronologi Akbar Sarosa Guru Honorer PAI dilaporkan Orangtua Siswa Buntut Hukum Murid Tak Salat. *TribunSumsel.com*. https://sumsel.tribunnews.com/2023/10/09/kronologi-akbar-sarosa-guru-honorer-pai-dilaporkan-orangtua-siswa-buntut-hukum-murid-tak-salat#google_vignette
- Wuryandani, W., Maftuh, B., Sapriya, S., & Budimansyah, D. (2014). Pendidikan karakter disiplin di sekolah dasar. *Cakrawala Pendidikan*, 2, 87637.